

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PEMUNGUTAN LIAR  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEMUNGUTAN LIAR DI KANTOR  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KEC. SOMBA OPU)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum  
Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Pada Fakultas Syariah dan Hukum**

**Oleh :**

**Andi Nofita Rukmawana**

**Nim : 10200117035**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nofita Rukmawana  
NIM : 10200117035  
Tempat/Tgl.Lahir : Bulukumba, 21 November 1999  
Jurusan : Hukum Tatanegara  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Btn. Tamarunang Indah 1  
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pemungutan Liar  
Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Pemungutan Liar di  
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kec.Somba Opu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa 8 Agustus 2021

Penulis

Andi Nofita Rukmawana

NIM: 10200117035

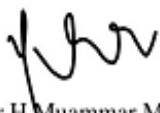
### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pemungutan Liar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemungutan Liar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec.Somba Opu)” yang di susun oleh Andi Nofita Rukmawana, NIM :10200117035 Mahasiswa prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Telah diuji dan dipertahankan dalam Munaqasyah dan dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat untuk meraih memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Syariah dan Hukum. Jurusan Hukum Tatanegara (dengan beberapa perbaikan)

Gowa 8 Agustus 2021  
29 zulhijah 1442 H

Ketua	: Dr.H.Muammar Muh.Bakry,Lc.,M.ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj.Rahmatiah HL,M.Pd	(.....)
Munaqasy I	: Dr. Andi Safriani S.H, M.H	(.....)
Munaqasy II	: Dr.Kurniati. S.Ag.M.Hi.	(.....)
Pembimbing I	: Dr.Nila Sastrawati,M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Anis. S.Ag.,M.H	(.....)

Di Sahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Syariah Dan hukum

  
Dr.H. Muammar Muh.Bakry,Lc.,M.ag  
NIP.19731122 200012 1 002

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pemungutan Liar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemungutan Liar Di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu)"**. Guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat berguna baik bagi penyusun maupun bagi pembaca pada umumnya.

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-kendala yang ada, maka Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, baik itu secara moril ataupun materil dari berbagai pihak terutama kepada ayahandaku tercinta Andi Muh.Jufri yang selalu bekerja keras membiayai kuliah penyusun dan selalu mendukung disetiap langkah anak-anaknya serta Ibundaku tercinta Andi Suhermah, yang selalu mendoakan, yang selalu memberikan yang terbaik, memberikan semangat dan masukan sehingga penyusun selalu bersemangat untuk menyelesaikan studinya di

Universitas Islam Negeri Alauddin. Dan juga penyusun merasa perlu mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, dan Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr.H.Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya:
3. Ibu Dr.Kurniati, M.H.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Rahmiati, M.pd. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara.
5. Ibu Dr. Nila Sastrawati, M.Si. Selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Anis, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II.
6. Ibu Dr. Andi Safriani S.H., M.H. Selaku penguji I dan Ibu Dr.Kurniati, M.H.I Selaku Penguji II.
7. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
8. Para Narasumber di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab,Gowa dan Masyarakat Kec. Somba Opu yang telah memberikan informasi terkait penyelesaian skripsi penulis.
9. Kepada orang tua Penulis Andi Muh.Jufri dan Andi Suhermah yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa kepada penulis serta telah mengasuh dan mendidik penulis dari kecil hingga saat ini.

10. Seluruh teman-teman Angkatan jurusan Hukum Tatanegara 2017 khususnya Teman Kelas Hukum Tatanegara (A) / Case Law yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.
11. Seluruh teman-teman rumah juang yang selalu menemani, mendukung dan memotivasi penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih atas semuanya.

Penulis menyadari semoga dengan bantuan yang penulis terima selama ini akan bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin.

Samata-Gowa 21 Juni 2021

Penulis

  
**Andi Nofita Rukmawana**  
**NIM:10200117035**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian penelitian terdahulu .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Kesadaran Hukum Masyarakat .....	11
B. Pemungutan Liar .....	17
C. Pemungutan Liar Perspektif Hukum Islam .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan data .....	35
E. Instrumen Penelitian .....	36

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	37
G. Pengujian Keabsahan Data .....	38

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi .....	40
B. Dampak pemungutan liar terhadap masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa Pemungutan Liar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa.....	44
C. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Somba Opu Terhadap Pemungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Islam .....	49

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Implikasi Penelitian.....	55

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	apostrof terbalik

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda, apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda ('),

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	<i>fathah an yā</i> ''	Ai	a dan i
وِى	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā</i> ''	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> <i>yā</i> ''	i	i dan garis di atas
وِى	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

### 4. Tā' Marbūṭah

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ّ ى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-*Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (هلال)

Kata “Allah” yang didahului partake huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *tā'* marbū'ah di akhir kata yang disandarkan kepadanya *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

## ABSTRAK

**Nama : Andi Nofita Rukmawana**

**NIM : 10200117035**

**Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pemungutan Liar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemungutan Liar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu)**

---

Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Kesadaran hukum masyarakat tentang pemungutan liar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa perspektif hukum Islam yang kemudian dibagi menjadi dua sub masalah yaitu 1. bagaimana dampak pemungutan liar terhadap masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa? 2. Bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kec. Somba Opu terhadap pungutan liar dalam Perspektif Hukum Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. Pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan observasi, wawancara langsung, kemudian mendokumentasikan melihat dokumen dan literature yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Dampak pemungutan liar terhadap masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu merusak moral dan merusak budaya, karena sifat sabar, disiplin dan tertip masyarakat akan terkikis dan rasa peduli masyarakat terhadap pemungutan liar itu masih kurang dan juga masyarakat bisa saja menganggap pemungutan liar itu adalah hal yang sudah biasa dilakukan dan wajar untuk dilakukan. 2. upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan memberikan pemahaman terkait dengan pemungutan liar serta menyampaikan bahwa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu tidak ada pemungutan apapun.

Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar mencegah dan mengurangi tindakan pemungutan liar serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Somba Opu terhadap pemungutan liar.

***Kata Kunci:***

*Kesadaran Hukum; Masyarakat; Pemungutan liar*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Peraturan tersebut ada dengan tujuan terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Membicarakan tentang masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik.<sup>1</sup> Semakin tidak baiknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung semakin membuat maraknya praktik tentang pungutan liar. Walaupun praktik pungutan liar masuk dalam kategori pelanggaran, namun praktik pungutan liar tersebut tetap semakin meraja lela pada pelayanan fasilitas publik. Beberapa instansi pelayanan public seperti (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Dan berbagai Instansi Pelayanan Publik

---

<sup>1</sup>Ratih Pratiwi, Hamza Hasan, *Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam*, Vol 2 no.2 2020. h.203 <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 24 Februari 2021).

lainnya dinilai rawan dengan praktik pungutan liar. demikian, hukum merupakan gejala sejarah sehingga memiliki sejarahnya sendiri.<sup>2</sup>

Hukum perundang-undangan sebenarnya adalah pelembagaan kembali kaidah-kaidah yang ada di tengah masyarakat. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang lahir sejatinya tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama islam. Terlebih lagi bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama islam (di dalam Al-Quran dan Hadist) tidak hanya berisi kaidah-kaidah yang mengatur tentang tatacara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi berisi juga kaidah-kaidah tentang interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat bahkan mengatur tentang Negara.<sup>3</sup>

Dasar hukum pelayanan publik di indonesia adalah undang-undang Nomor 25 tahun 2009, pelayanan publik menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam undang-undang ini

---

<sup>2</sup>Marilang, *Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah*, Vol 7 no.2 2018., h.384 <https://journal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 3 Maret 2021).

<sup>3</sup>Ahkam Jayadi., *Membuka Tabir Kesadaran Hukum.*, Vol 4 no.2 2017. h.14-15 <https://journal.uin-alauddin.ac.id> ( Di akases dari internet tanggal 21 Februari 2021).



ada standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik baik itu pemerintah pusat maupun daerah.

Pungutan liar atau biasa di singkat pungli dapat di artikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, abik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang<sup>4</sup>

Praktik pungutan liar pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa serta bernegara. Dampak negatif yang muncul akibat praktik pungli tersebut sehingga memunculkan upaya untuk melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera pada para pelaku praktik pungli. Maraknya kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintah sehingga menyebabkan presiden Joko Widodo menginstruksikan pembentukan satgas sapu bersih pungutan liar melalui perpres No. 87 Tahun 2016 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Menurut

---

<sup>4</sup>Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, Dan Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang",. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12 No. 2,( 2013): h.75.

pandangan pembentukan undang-undang suatu aturan dibuat untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat.<sup>5</sup>

Eksistensi manusia sebagai pemakmur bumi tidak terlepas dari fungsi manusia secara vertikal dan horizontal. Fungsi vertikal mengarahkan manusia memperhambakan diri mereka kepada Allah. Sementara fungsi horizontal, mengarahkan manusia untuk saling terhubung antara satu dengan lainnya. Peneguhan dari fungsi ini mengharuskan manusia melaksanakan hubungan kepada sesama.<sup>6</sup> Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Islam yang berarti keselamatan bagi para umat manusia bagi yang memeluknya yang berarti menjauhkan dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Dalam agama Islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya.<sup>7</sup> Al-Qur'an adalah kitab suci yang dinyatakan Rasulullah saw. sebagai tali Allah yang terulur dari langit ke bumi, siapa yang berpegang dengan petunjuknya dia tidak akan sesat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>P.A.F.Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi* (Pionir Jaya: Bandung).h.6.

<sup>6</sup>Subehan Khalik, *Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah*, Vol.7 No.1. h.40 <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 3 Maret 2021).

<sup>7</sup>Ibrahim Hot, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*, (Grup Penerbit CV Budi Utama; Yogyakarta, 2017), h.11.

<sup>8</sup>Dudung Abdullah, *Komunitas Yang Gagal Meraih Kesuksesan (Tafsir Analisis Tentang Term Al-Sāhirūn, Al-Zālimūn Dan Al-Kāfirūn*, vol 2 no 1 2018, h.87. <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 3 maret 2021).

Realitas hukum islam sebagai hukum yang berdiri sendiri merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat.<sup>9</sup>Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Allah SWT. Melarang manusia untuk berbua atau melakukan suap dan menerima suap. Kedua perbuatan tersebut merupakan jalan yang batil kemudian membawa kepada keburukan bagi pelaku terlebih orang yang di khianati.<sup>10</sup>

Keuniversalan hukum Islam dapat dilihat dari berbagai persoalan termasuk sistem pelayanan publik yang merupakan dambaan masyarakat.<sup>11</sup> Sektor pelayanan publik khususnya kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap aktifitas pungutan liar. Uang pungutan liar masuk ke kantong oknum pegawai dan Keuangan Daerah dirugikan. Dan juga kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait dengan hal ini Sehingga penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pemungutan Liar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemungutan Liar Di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu).

---

<sup>9</sup>Muhammadong, *Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsmen Kota Makassar*. Vol.No 1 2014 h.35. <https://journal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 25 Februari 2021).

<sup>10</sup>Ibrahim Hot, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*( Grup Penerbit CV Budi Utama; yogyakarta,2017). h,11.

<sup>11</sup>Muhammadong, *Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsmen Kota Makassar*. h.36.

## **B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat tentang pemungutan liar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kec.Somba Opu Kab.Gowa Perspektif Hukum Islam.

### **2. Deskripsi Fokus**

Diperlukan untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap kata-kata yang mengandung istilah dalam judul skripsi ini, untuk memudahkan makna yang tertuang dalam penelitian ini pertama perlu dijelaskan inti pembahasan.

#### **a. Kesadaran hukum masyarakat**

Kesadaran hukum masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Somba Opu terhadap pemungutan liar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### **b. Pungutan liar**

Tindakan yang dilakukan Masyarakat dan pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan cara mengambil maupun meminta jumlah uang yang dilakukan kepada masyarakat setempat.

#### **c. Hukum Islam**

Hukum Islam yang di maksud dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pemungutan liar yang sering terjadi pada saat ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah sebagai berikut bagaimana Kesadaran hukum masyarakat terhadap pemungutan liar Perspektif Hukum Islam di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kec.Somba Opu. Untuk memperjelas arah penelitian ini sesuai dengan permasalahan, maka berikut ini uraian dalam beberapa sub masalah antara lain:

1. Bagaimana dampak pemungutan liar terhadap masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kec.Somba Opu terhadap pungutan liar dalam Perspektif Hukum Islam ?

### **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Gowa dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Pemungutan Liar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu belum pernah diteliti. Namun ada beberapa penelitian yang sama-sama terkait dengan Pemungutan Liar. Demikian beberapa di antaranya sebagai berikut:

*pertama*, dalam jurnal ”implementasi undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten

paser.” yang disusun oleh Restu Denis Ahdhan. Dalam jurnal ini peneliti membahas tentang bagaimana implementasi undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser termasuk didalamnya kendala-kendala yang di hadapi dalam implementasinya.. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pungutan liar.

*Kedua*, Buku “Manajemen Pelayanan Publik” yang disusun oleh Hayat. Dalam buku ini membahas tentang bagaimana menerencana dan melakukan evaluasi terhadap aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat. Dalam buku ini hanya berfokus pada bagaimana peningkatan pelayanan publik yang di lakukan oleh aparatur sipi negara sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab yang melekat pada dirinya dan tidak membahas tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakatnya.

*Ketiga*, dalam jurnal “Pelayanan Publik Di Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Kota Makassar)”. Yang disusun oleh Abd. Rais Asmar. Dalam Jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam pengurusan indentitas warga dalam hal administratif, langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki sistem Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar dan efektivitas pelaksanaan Perda kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.. Dalam jurnal ini hanya berfokus pada faktor-faktor penyebab masalah pengurusan indentitas warga di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar dan

tidak membahas kesadaran hukum masyarakat dan pungutan liar dalam perspektif hukum islam.

*Keempat*, dalam jurnal “Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia” yang disusun oleh Nyoman Trisna Sari Pratiwi dan Ni Nengsi Adiyaryani. Dalam jurnal ini membahas tentang pertimbangan Presiden dalam menetapkan kebijakan untuk memberantas pemungutan liar dan tentang siapa saja yang berperan dalam pemberantasan pemungutan liar dan dalam jurnal ini hanya berfokus pada pemberantasan pungutan liar sebagai bentuk kebijakan kriminal di indonesia dan tidak membahas pemungutan liar dalam perspektif hukum islam.

*Kelima*, dalam jurnal “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia” yang disusun oleh Atang Hermawan Usman. Dalam jurnal ini membahas tentang upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di indonesia serta membahas tentang kesadaran hukum baik dari masyarakat maupun pemerintah tetapi dalam jurnal ini tidak membahas tentang kesadaran hukum masyarakat perspektif hukum Islam.

#### **E. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu.

1. Untuk mengetahui dampak pemungutan liar terhadap masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui upaya peningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kec.Somba Opu terhadap pungutan liar dalam Perspektif Hukum Islam .

Sedangkan kegunaan penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut;

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yakni sangat diharapkan mendapatkan sebuah hasil yang berguna bagi seluruh kalangan dimanapun dan menjadi sebuah alat informasi yang mempermudah untuk mendapatkan sebuah pengetahuan tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kec.Somba Opu terhadap pungutan liar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat diaplikasikan di kehidupan agar dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kec. Sumba Opu terhadap pungutan liar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kec.Sumba Opu Kabupaten Gowa.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Kesadaran Hukum Masyarakat

##### 1. Kesadaran hukum

Kesadaran adalah pemandu moral bagi pikiran, dan tujuan utamanya adalah memodifikasi target dan tujuan seseorang agar selaras dengan hukum moral yang berlaku pada alam dan umat manusia.<sup>1</sup>

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan<sup>2</sup>. Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang di kehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Napoleon Hill, *Secrets Napoleon Hill's Mind* (PT.Cahaya Insan Suci: Jakarta Selatan,2009),h.275.

<sup>2</sup>Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Grup Penerbitan CV Budi Utama: Yogyakarta,2015),h.219.

<sup>3</sup>Imam Jauhari, *Sosiologi Hukum*,(Pustaka Bangsa Presss : Medan,2009),h.166.

Menurut AW. Widjaja mengenai definisi kesadaran hukum yaitu “Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat”.<sup>4</sup>

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.<sup>5</sup>

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum<sup>6</sup>. Dengan begitu maka yang di sebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang

---

<sup>4</sup>A.W. Widjaja, *kesadaran hukum manusia dan masyarakat pancasila*, { CV.Era Swasta, Jakarta, 1984),h.14

<sup>5</sup>Bani Ahmad Suebani, *Sosiologi Hukum*,(Pustaka Setia: Bandung,2013),h.197.

<sup>6</sup>Krabbe Dalam Aveloorn,V, 2000, *Pengetahuan Ilmu Hukum*,( Jakarta:PT,Pradnya Paramita),h.9.

tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.<sup>7</sup>

Kesadaran hukum mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Pengetahuan terhadap hukum.
- b. Penghayatan tentang fungsi hukum.
- c. Ketaatan terhadap hukum.

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketrentaman yang dikehendaki atau sepantasnya. Berkaitan dengan indikator Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:

1. Pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi

---

<sup>7</sup>Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*.. h.219.

pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

3. Sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.<sup>8</sup>

Secara menyeluruh, yang paling berpengaruh adalah terhadap pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum. Pengetahuan yang dimilikinya kebanyakan diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran hukum yang meningkat tergantung pada meningkatnya materi ilmu hukum yang disajikan.

---

<sup>8</sup>Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Alumni, Bandung, 1993),h.40-42.

Kesadaran hukum merupakan hasil dari serangkaian proses hubungan yang saling berkaitan di antara tiga hal tersebut, yang satu sama lain saling terkait. Orang harus mengetahui hukum, kemudian diharapkan memahami hukum tersebut, dan akhirnya menaati atau mematuhi hukum itu.<sup>9</sup>

Sudikmo Mertokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum muncul dari keinginan bersama untuk melindungi kepentingan bersama agar tidak terjadi benturan di antara sesama anggota masyarakat. H.C, Kelman Dan L.,Pospisil dalam buku Achmad Ali mengatakan bahwa ketaatan hukum dibedakan kualitasnya dalam tiga hal, yaitu:

- a. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan adanya imbalan jika berbuat atau ada sanksi yang dikenakan jika melanggar hukum.
- b. *Identification*, yaitu kepatuhan terhadap hukum bukan nilai intrinsiknya tetapi agar tetap terjaga anggota kelompok masyarakat sebagai sebuah identitas yang harus selalu di pelihara dengan baik,
- c. *Internalization*, yaitu kepatuhan kepada hukum karena merupakan bagian darinya dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dari anggota masyarakat tersebut dan merupakan bagian dari dirinya yang merupakan nilai intrinsiknya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Haseel Nogi S.Tangkilian, *Manajemen Publik* (PT.Gramedia Widiasarana:Indonesia,Jakarta,2005),h.302.

<sup>10</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Kencana, Jakarta:2015),h.347-348.

Dalam membahas tentang kesadaran hukum masyarakat, terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, budaya dan undang-undang. Adapun menurut Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

## 2. Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, serta melakukan interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, dan memiliki kebudayaan didalamnya. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain).

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Raja Grafindo Persada:Jakarta,2014),h.8.

## B. *Pungutan liar*

### 1. *Defenisi pungutan liar*

Pungutan liar, Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan: “pung” artinya persembahkan. Jadi pungli di ucapkan puuungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.<sup>12</sup>

Dari segi bahasa, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni ‘pungutan’ dan ‘liar’. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan berarti barang yang di pungut, dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang.<sup>13</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran

---

<sup>12</sup>Soedjono D,SH., *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi* (Sinar Baru :Bandung, 1983) h.35.

<sup>13</sup>Peter Salim Dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Modern English Press: Jakarta; 1991), h.1206.

<sup>14</sup>Ibrahim Hot, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli* ( Grup Penerbit CV Budi Utama; Yogyakarta,2017),h.9.

sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini biasa di samakan dengan perbuatan pemerasan.<sup>15</sup>

Pungutan liar adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan gejala suatu gejala sosial yang telah terjadi cukup lama di Indonesia, bahkan sejak masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu<sup>16</sup>. Pungutan liar kebanyakan dilakukan saat berlangsungnya suatu kegiatan yang berkaitan antara si pemberi dan si penerima namun sebagian ada juga yang memberi sebelum terjadinya suatu kegiatan dengan unsur memperlancar atau mendahulukan dibanding yang lain atau mengambil hak orang lain. Oknum yang melakukan pungli bermaksud memperoleh suatu dengan tujuan keuntungan dari kegiatan yang sedang berlangsung.

Pungutan liar adalah kegiatan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau di pungut. Kegiatan pungutan liar bukanlah hal yang secara etimologi dapat di artikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran atau meminta uang secara paksa.

Pungutan liar adalah salah satu bentuk korupsi yang banyak dihadapi masyarakat. Pungli terutama terjadi pada berbagai sektor pelayanan publik. Pelakunya adalah pejabat-pejabat yang berwenang dalam pengambilan suatu keputusan yang dapat menyalahgunakan keputusannya, dan di sisi lain, pungli

---

<sup>15</sup>Lijan Poltak Sinambela., *Reformasi Pelayanan Publik: Terori, Kebijakan Dan Implementasi* (Sinar Grafika Offser:Jakarta.,2006).

<sup>16</sup>Ratih Pratiwi., Hamza Hasan., *Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam.*, h.203.



menjadi jalan pintas masyarakat untuk mencapai tujuannya. Namun, tidak dapat di pungkiri, pungli jelas merugikan negara dan bangsa dalam bentuk penurunan daya saing.<sup>17</sup>

Pungutan liar dilakukan terbuka dengan meminta sejumlah uang administrasi kepada warga masyarakat yang memerlukan pelayanan. Dalam kasus pelayanan publik, sering kali pemberian uang saap kepada aparat atau pejabat dilakukan karena orang merasa perlu memberi sejumlah uang sebagai imbalan bagi pelayanan yang mereka terima, meskipun hal itu tidak menjadi bagian dari prosedur administrasi.<sup>18</sup>

## **2. Dampak pungutan liar**

Adapun dampak yang di timbulkan dari pungutan liar yaitu:

### **a. Pungutan liar merusak moral.**

Kita ketahui bahwa warga negara indonesia terdiri dari beragam suku dan adat istiadat namun jika kita perhatikan adab kebiasaan warga negara kita menjunjung tinggi kesopanan dan keramah tamahan sehingga hal inilah yang sering dipengaruhi oleh para pelaku untuk mengambil kesempatan melakukan pungutan liar. Kehidupan yang serba selalu ingin berurusan dengan cepat tanpa mengindahkan proses tata kerja dan tertip antri sehingga praktik ini semakin menjamur. Sifat

---

<sup>17</sup>Widyo Pranomo., *Melawan Korupsi Tanpa Gaduh*.(Rayyana Komunikasindo:Jakarta:2019),h.448.

<sup>18</sup>Forum Studi Keuangan Negara., *Esai Keuangan Negara Sumbangi Pemikiran Untuk Negeri*,.(Dianra Kreatif),h.49.

sabar dan tertib yang dimiliki masyarakat semakin terkikis dengan sifat mau menang sendiri sehingga keegoan hati di kedepankan.<sup>19</sup>

Rasa cinta tanah air akan mulai terkikis di hati masyarakat karena pelaku para oknum yang melakukan pungutan liar sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang. Rasa peduli di dalam masyarakat pun semakin menipis dengan berfikir segala sesuatunya bisa diatur dengan uang.<sup>20</sup>

b. Merusak Budaya

Perbuatan melawan hukum berupa pungutan liar yang dilakukan secara terus menerus dan secara sistemik serta dalam jangka waktu yang sangat lama, tentu saja menjadi penyebab lahirkan budaya buruk, yakni budaya koruptif. Jika pungutan liar telah menjadi budaya, maka budaya itu akan amat sulit untuk di sembuhkan.<sup>21</sup>

Adapun dampak langsung yang dirasakan masyarakat akibat pungli adalah *high cost economy*, masyarakat/pengusaha mengeluarkan biaya tambahan untuk suatu layanan yang seharusnya cuma-cuma karena telah dibiayai oleh negara. Hal ini akan berdampak pada biaya produksi sekaligus harga jual sehingga barang-barang produksi dalam negeri kita tidak kompetitif terhadap barang luar negeri. Masyarakat

---

<sup>19</sup>Ibrahim Hot, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*, h.3.

<sup>20</sup>Ibrahim Hot, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*, h. 31.

<sup>21</sup>Ibrahim Hot, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*, h.31.

berpenghasilan rendah akan sangat merasakan beban tambahan dari adanya pungli.

Akibat pungli, citra negatif aparat atau pejabat cenderung dipersepsikan sebagai gaji rendah, kinerja rendah, tidak profesional, tidak mengenal sistem merit, kerjanya lamban, pelayanan tidak memuaskan, dan stigma jelek lainnya melekat pada birokrasi kita. Upaya-upaya untuk memberantas pungli dan menghapus citra negatif yang melekat pada birokrasi pemerintah tak pernah berhenti dilakukan.<sup>22</sup>

### **3. Faktor penyebab adanya pungutan liar**

Dunia realitas saat ini adalah dunia dengan entitas-entitas yang saling berhubungan secara sistematis. Ekonomi, hukum, seni, dan politik menyatu menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dan prestise.<sup>23</sup> Masyarakat rela membayar lebih mahal agar terhindar dari ketidakpastian pelayanan. Akibatnya, biaya pelayanan publik di Indonesia selalu di atas tarif resmi. Pada sejumlah pelayanan publik, besarnya biaya yang harus di bayar oleh masyarakat sering kali berlipat ganda dari ketentuan resmi.<sup>24</sup>

Adapun faktor penyebab seseorang melakukan tindakan pungutan liar yaitu:

---

<sup>22</sup>Forum Studi Keuangan Negara, *Esai Keuangan Negara Sumbangsi Pemikiran Untuk Negeri*,. h. 49-50.

<sup>23</sup>Nila Sastrawati, *Personal Branding Dan Kekuasaan Politik Di Kabupaten Luwu Utara*, Vol 6 No 2 2017. h.277 <https://jurnal.uin-alaudidin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 3 Maret 2021).

<sup>24</sup>Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, (PT.Gramedia Pustaka Utama:Jakarta:2011),h.90.

- a. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang bisa melakukan pelanggaran kedisiplinan oleh pelaku yang melakukan pungutan liar.
- b. Faktor mental. Karakter atau pelaku seseorang dalam bertindak dan melakukan kontrol terhadap dirinya.
- c. Faktor ekonomi. Penghasilan yang dapat dikatakan tidak bisa untuk mencukupi keperluan hidup yang tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang di jalankan seseorang tersebut menjadikan terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural dan budaya Organisasi. Budaya yang ada di sebuah lembaga berjalan secara terus menerus pada pungutan liar. Dan penyuaan bisa menjadi sebab terjadinya pungutan liar menjadi hal yang biasa
- e. Lemahnya sistem yang mengontrol dan mengawasi dari atasan.<sup>25</sup>

#### 4. *Upaya mengurangi pungutan liar*

Generasi adalah hal yang sangat penting dalam memajukan sebuah bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa sangat di pengaruhi oleh generasi yang di miliki bangsa itu. Sebab generasi yang baik akan mencetak bangsa yang kuat dan beribawa.<sup>26</sup> Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat harus di tumbuhkan sejak dini.

---

<sup>25</sup><https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/> (Diakses dari internet tanggal 3 juni 2020).

<sup>26</sup>Muhammad Anis, *Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vol 1 No.1 2019. h.99 <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 3 Maret 2021).

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh untuk mengurangi pungli yaitu:

- a. Menindak pegawai yang terlibat pungli.
- b. Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain.
- c. Meminta kepala instansi untuk memberlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat.
- d. Memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan.
- e. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktek pungli.
- f. Membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan.

##### **5. *Dasar Hukum Pungutan liar***

Dalam KUHP diatur dalam pasal:

- a. Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

b. Pasal 423 KUHP

“Pegai Negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalah gunakan kekuasaanya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan penotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”<sup>27</sup>

Pemakaian kata pengutan liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegak hukum di tanah air, karena orang kemudia mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang di larang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu di tuntutan menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus di tuntutan menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa di sebut pengutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan mengambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administrasi terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang di sebut pengutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam pasal 12 huruf e dan f undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

---

<sup>27</sup>P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta;2006),h.318.

“pencucian uang (Money laundering) adanya kerja sama antara penegak hukum dengan pusat pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pencucian uang sudah terstruktur dan masif hingga sulit diatasi dimulai dari pejabat pelayanan publik sampai”,<sup>28</sup>

### C. *Pungutan Liar Perspektif Hukum Islam*

#### 1. *Istilah pungutan liar*

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa arab yang berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat “anak burung yang merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk di asupi”.<sup>29</sup>

Adapun secara terminologi , *risywah* adalah sesuatu yang di berikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang di berikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>30</sup>

Imam Adz Dzahabi berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang pada rakyatnya.

---

<sup>28</sup>Ibrahim Hot, *Rahasia Di Balik Sapu Bersih Pungli*,h.39.

<sup>29</sup>H.M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam*,.( Amzah:Jakarta: 2011), h.89.

<sup>30</sup>H.M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam*,h.89.

Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama memakan harta haram.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup>Mam Adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar* (Pustaka Arafah: Solo:2007) h.191.



## 2. *Dalil-dalil pungutan liar*

Allah telah menurunkan syari'at terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Syari'at ini memiliki ciri khas rasional dibekali wahyusebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah.<sup>32</sup> Al-Qur'an adalah kitab suci umat islam sebagai mukjizat sepanjang zaman yang berfungsi sebagai hudan bagi seluruh manusia, sekalipun yangmemanfaatkan dengan baik hanyalah orang-orang yang bertakwa.<sup>33</sup> Agama islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain lain. Islam yang bearti keselamatan bagi para umat manusia yang memeluknya yang berarti menjauhkan umatnya dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Ketika seseorang memiliki iman yang mantap selalu merasa bersama dengan Allah. Allah maha melihat, maha mengawasi. Kemudian juga model pencegahan dari aspek ibadah, sebab salah satu fungsi ibadah itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar.<sup>34</sup> hukum Islam sebagai ketentuan yang mengatur nilai-nilai hukum perbuatan ummat manusia terutama para mukallaf yang sumber utamanya Al-Qur'an dan Hadis, telah mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam

---

<sup>32</sup>Subehan Khalik, *Menguak Eksistensi Akal Dan Wahyu Dalam Hukum Islam*, vol 6 no.2 2017, h.359, <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 3 Maret2021).

<sup>33</sup>Dudung Abdullah, *Komunitas Yang Gagal Meraih Kesuksesan Ii:Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun Dan Allazina Yaftaruna 'Alaallahi Al-Kaziba*, Vol.7 no 2 2018, h.249. <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 3 Maret 2021).

<sup>34</sup>Hamzah Hazan, *Hukum Pidana Islam*,. (watampone:Syahadah,,2016),.h.145.

sekitarnya.<sup>35</sup> Dalam agama islam dengan jelas menerangkan bahwa penganutnya dilarang untuk melakukan perbuatan memakan yang bukan haknya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran. QS.Al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>36</sup>

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih” QS. Asy- Syura/26:42

Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram menurut ayat-ayat Al-Quran sehingga Allah SWT melarang hal tersebut.

Di dalam hadist Nabi Di antara dalil diharamkannya menarik *al-muks* (pungutan) adalah hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw. bersabda.

<sup>35</sup>Alimuddin, *Hisab Rukyat Waktu Shalat Dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara Astronomi Awal Dan Akhir Waktu Shalat)*, Vol.8 No 1, h.39. <https://jurnal.uin-alaudidin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 3 Maret 2021).

<sup>36</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia. *Qur'an Kemenag*.

لا يدخل الجنة صاحب مكس

“Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pungutan”

Di dalam hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda : dari Ibnu Umar RA, ia berkata: “*Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap*”<sup>37</sup>

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُخْتِ النَّارِ أَوْ لَى بِهِ

“Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dagingnya tumbuh dari makan haram. Neraka lebih layak (membakar) daging itu.”<sup>38</sup>

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu berkata “*Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan minta disogok*”<sup>39</sup>

Hukum Islam mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasulnya.<sup>40</sup> Allah swt adalah pencipta yang terbaik, Segala ciptaan-Nya tak seorang pun mampu menandinginya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya hadir ke pentas dunia dalam bentuk yang sebaik-

<sup>37</sup>HR At-Tirmidzi,1/250; Ibnu Majah, 2313 dan Hakim,4/102-103; dan Ahmad 2/164,190,<https://almanhaj.or.id/2283-hukum-seputar-suap-dan-hadiah.html> (Diakses dari internet tanggal 27 Agustus 2020).

<sup>38</sup>HR. Al Baihaqi, Al Bazzar, Al Haitsami, Abu Ya'la, Thabrani dengan berbagai redaksi, sebagiannya sanadnya hasan), <https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/11/09/tidak-masuk-surga-pemungut-pajakcukai/>. (Diakses dari internet tanggal 24 November 2020).

<sup>39</sup>HR.Ahmad,Tirmidzi,<https://www.kompasiana.com/taqie31/5a8e9e5816835f62e943fac4/penyeleewengan-jabatan>. (Diakses dari internet tanggal 24 November 2020).

<sup>40</sup>Muhammadong, *Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsmen Kota Makassa*. h.37.

baiknya, jasmani dan rohani.<sup>41</sup> Syekh Yusuf Qaradhawi mengungkapkan, bahaya rakus terhadap kekayaan menjadi manusia ingin segera memperolehnya sebelum waktunya. Sementara, hukum Allah yang kodrati dan syar'i menetapkan bahwa orang yang tergesa-gesah hendak mendapatkan sesuatu sebelum waktunya terkena hukuman dengan terhalang memperolehnya (sebelum waktunya itu). Tidak jarang, keinginan tersebut justru menjadikan orang bersangkutan nekad melakukan perbuatan melanggar hukum baik hukum syara maupun negara. Di antara yang harus ditunaikan untuk memperoleh harta menurut syara adalah mencarinya dengan jalan yang halal. Menginfakkannya sesuai dengan kewajiban, dan tidak bakhil saat dating nasabnya untuk berzakat juga sedekah.<sup>42</sup>

### 3. *Hukuman pelaku pungutan liar menurut islam*

Al-Quran dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa bahasa Arab sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk bertadabbur, tabashur, tadzakkur dan tafakkur.<sup>43</sup> Berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pelaku *risywah*,

---

<sup>41</sup>Dudung Abdullah, *Al-Qur'an Dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term "Al-Birr")*, Vol 6 No.1 2017, h.1. <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 3 Maret 2021).

<sup>42</sup>Syekh Yusuf Qaradhawi, *Kumpulan Fatwa Tentang Zakat Dan Sedekah*, ( Buku Andalan: Jakarta: 1995) h.361.

<sup>43</sup>Dudung Abdullah, *Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Tentang Makna Dan Eksistensi)*, Vol.6.no2. 2017, h.333. <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id> (Di akses dari internet tanggal 3 Maret 2021).

tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukuman bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin Al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-Quran dan Hadist), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetisinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.<sup>44</sup>

Lebih lanjut Al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi *ta'zir* bagi pelaku jarimah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksud kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dengan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku, membersihkan masyarakat dari penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemunkaran yang seharusnya di berantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah "*barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran maka ubahlah kemunkaran itu dengan tangannya..*" (HR,Muslim,Al-Tirmidzi,Al-Nasa'I, dan Ahmad).

---

<sup>44</sup>H.M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam*,.( Amzah:Jakarta, 2011),h.103.

Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadist pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut.

Pernyataan Al-Thariq memang sangat logis , yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apabila kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia, harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi hampir semua lini dan sektor kehidupan. Upaya pemerintah selama ini hanya di masa reformasi bahkan sejak Orde lama dan Orde Baru berbagai peraturan dan sederet undang-undang telah bermunculan untuk berupaya memberantas korupsi, tetapi seperti yang biasa dilihat hasilnya masih belum memuaskan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>H.M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam*,.( Amzah :Jakarta: 2011),h.104.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian baik dalam metode pengumpulan data maupun dalam pengelolannya. Dengan demikian penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung melihat gejala sosial dan melibatkan orang-orang yang terkait dengan gejala sosial tersebut. Lalu mengumpulkan informasi tersebut untuk di analisis,<sup>1</sup> sehingga peneliti dapat menyimpulkan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

###### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu: suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati.<sup>2</sup> Penelitian kualitatif berusaha memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data dan menganalisa. Peneliti bertindak sebagai pengamat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ratih Pratiwi., Hamza Hasan., *Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam.*, h.204.

<sup>2</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Pt Remaja Rosdakarya,2000) h. 3.

<sup>3</sup>Chalid Narbuko Dan Achmadi, *Metologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. VIII,2007), h.44.

Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan penelitian kualitatif yang memaparkan, situasi, kondisi, dan kejadian tentang kesadaran Hukum masyarakat di Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemungutan Liar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan.

## 2. Lokasi penelitian.

Untuk memperoleh informasi pengumpulan data yang di butuhkan dalam menyusun proposal penelitian skripsi juga dilakukan di wilayah Kec. Somba Opu dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. Karena di wilayah tersebut terdapat masyarakat yang dapat di wawancarai langsung.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-



asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan syar'i yaitu pendekatan yang menggunakan hukum islam sebagai acuan dalam penelitian ini.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang di peroleh di langsung dari sumbernya baik melali wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan responden.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek untuk memahami pengetahuan dari suatu kejadian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan".<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Hadani Nabawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gaja Mada University Press:1990), h.100.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>5</sup>

Dalam Penelitian Ini, Yang Akan di wawancarai adalah salah satu Pegawai Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Gowa dan Masyarakat Kec.Somba Opu.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis atau gambar. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.<sup>6</sup>

## E. *Instrument Penelitian*

Instrumen penelitian adalah suatu pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Adapun instrument penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

### 1. Peneliti Sendiri

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian.

---

<sup>5</sup>W. Gulo. *Metode Penelitian*, (Pt Grasindo:Jakarta:2005), h.119.

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,(Rineka Cipta: Jakarta 2006).h. 274.

2. Pedoman Wawancara/daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan adalah pegangan yang akan ditanyakan nantinya pada saat melakukan wawancara kepada narasumber.

3. Handphone untuk dokumentasi.

Handphone adalah sebuah alat yang di gunakan untuk membentuk, mengambil suatu bayangan atau gambar.

4. Alat tulis

Alat tulis adalah peralatan yang di pergunakan untuk menuliskan atau menorehkan tanda atau bentuk di atas suatu permukaan.

**F. Teknik pengolahan dan Analisis data**

1. Teknik pengolahan data

- a. Reduksi data yaitu merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penerikan kesimpulan.
- b. Penyajian data yaitu merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistimatis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.
- c. Kesimpulan yaitu untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## 2. Analisis data

Analisis data kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang di kumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu di tekankan pada uji validasi dan reliabilitas. Pemeriksaan terhadap pkeabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyangga balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat di laksanakan yaitu:

#### 1. *Creadibility*

Uji *Creadibility* (kreadibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan agar hasil penelitian yang di lakukan tidak di ragukan sebagai suatu karya ilmiah.

#### 2. *Transferability*

*Transferability* merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukan derajat ketetapan atau dapat di terapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel di ambil.

#### 3. *Dependability*

Pengujian *Dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang

independent atau pembimbing yang independent mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

#### 4. *Confirmability*

Uji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kecamatan Somba Opu**

Kecamatan Somba Opu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Gowa. Dengan luas wilayah 28,09 Km<sup>2</sup> atau 2.809 Ha (1,49% dari luas wilayah Kabupaten Gowa), dengan batas-batasnya Sebelah Utara : Kota Makassar, Sebelah Barat : Kota Makassar, Sebelah Selatan : Kecamatan Palangga, Sebelah Timur : Kecamatan Patalassang Dan Kecamatan Bontomaranu.

Terbagi dalam wilayah administrasi, masing-masing yaitu :

- a. Kelurahan Sungguminasa luas 1,46 Km: Lingkungan Lambasele dan Lingkungan Sungguminasa.
- b. Kelurahan Bonto-bontoa luas 1,61 Km<sup>2</sup> : Lingkungan Bonto-bontoa dan Lingkungan Bontokamase.
- c. Kelurahan Batangkaluku luas 1,30 Km<sup>2</sup> :Lingkungan Batangkalukudan Lingkungan Karetappa
- d. Kelurahan Tompobalang luas 1,80 Km<sup>2</sup> : Lingkungan Cambaya dan Lingkungan Je'neberang
- e. Kelurahan Katangka luas 1,36 Km<sup>2</sup>: Lingkungan Lakiyung dan Lingkungan Katangka
- f. Kelurahan Pandang-pandang luas 1,55 Km<sup>2</sup>: Lingkungan Pandang-pandang dan Lingkungan Mangasa

- g. Kelurahan Tombolo luas 2,06 Km<sup>2</sup> : Lingkungan Tombolo dan Lingkungan Pa'bangiang
- h. Kelurahan Kalegowa luas 1,21 Km<sup>2</sup>: Lingkungan Hasanuddin dan Lingkungan Tamalate
- i. Kelurahan Samata luas 2,44 Km<sup>2</sup>: Lingkungan Samata dan Lingkungan Borong Raukang
- j. Kelurahan Romang Polong luas 3,71 Km<sup>2</sup>: Lingkungan R. Polong dan Lingkungan Garaganti
- k. Kelurahan Paccinongang luas 2,32 Km<sup>2</sup>: Lingkungan Pacinongang dan Lingkungan Pao-pao
- l. Kelurahan Tamarunang luas 2,16 Km<sup>2</sup>: Lingkungan Panggentungan dan Lingkungan Beroanging
- m. Kelurahan Bontoramba luas 2,20 Km<sup>2</sup>: Lingkungan Galoggoro dan Lingkungan Bontobaddo
- n. Kelurahan Mawang luas 2,99 Km<sup>2</sup>: Lingkungan Biring Balang dan Lingkungan Buttadidi

## **2. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Gowa**

- a. Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa dibentuk pada awal pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten pada tahun 1995, setelah beberapa tahun berjalan terjadi merger pada beberapa dinas, maka dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2002 di gabungkan dengan Dinas Tenaga Kerja, dan pada tahun 2009 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kembali berdiri sendiri.

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa berkedudukan di Ibukota Kabupaten yaitu di jalan Tumanurung no. 2 Sungguminasa sebelah utara lapangan Syekh Yusuf dan Syekh Yusuf Discovery. Tergabung di dalam kompleks gabungan dinas-dinas pemerintah kabupaten Gowa berdekatan dengan musholla Al-Ichsan dan berada di belakang gedung badan perencanaan\ pembangunan daerah (BAPPEDA) kabupaten Gowa dengan luas bangunan 120 m<sup>2</sup> dan luas tanah 440 m<sup>2</sup>.

- b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa.
  - 1) Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa  
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan menuju masyarakat kabupaten Gowa yang berkualitas.



2) Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Gowa Adapun misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam mengatur, merencanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan standar pelayanan publik.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan standar pelayanan publik.
- d) Meningkatkan akurasi pengolahan dan penyajian data kependudukan melalui tata kelola sistem informasi administrasi kependudukan yang profesional dan bertanggungjawab.
- e) Meningkatkan kuantitas pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil melalui kerjasama lintas sektor, inovasi serta sistem penataan kearsipan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara elektronik.

**B. Dampak Pungutan Lir terhadap Masyarakat Di Kec Somba Opu Kabupaten Gowa**

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat pada umumnya dan khususnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pemungutan liar di pengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum serta dari sikapnya terhadap hukum. untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur, yaitu :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.
4. Pola-pola perikelakuan hukum.

Sesuai dengan fungsinya, hukum dapat mengubah kondisi masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan hukum, hidup masyarakat akan menjadi teratur

serta tidak ada pertentangan apabila menaati aturan hukum tersebut. Dengan demikian, untuk tercapainya sasaran itu, maka seluruh elemen masyarakat harus sadar untuk dapat melaksanakan peraturan hukum tersebut.

Maraknya pungutan liar yang terjadi di masyarakat dan sampai saat ini keberadaannya masih belum bisa diberantas dengan tuntas. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Istilah yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar adalah uang sogokan atau uang pelicin. Pada hakikatnya, pungutan liar merupakan dampak dari interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Salah satu faktor terjadinya pemungutan liar yang biasa terjadi di sektor pelayanan publik salah satunya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap Pemungutan liar itu sendiri.

Apa bila pemungutan liar ini masih sering terjadi di sektor pelayanan publik maka akan memberikan dampak terhadap masyarakat. Adapun dampak dari pemungutan liar itu:

## 1. Pemungutan liar merusak moral

Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemungutan liar bukan hal yang baik untuk dilakukan sehingga apa bila pemungutan liar ini masih marak dilakukan di kalangan masyarakat akan membuat hal ini menjadi hal yang umum atau biasa dilakukan. Sifat sabar, disiplin dan tertip yang dimiliki masyarakat akan terkikis.

berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anugrah Maulana mengatakan bahwa :

pemungutan liar itu adalah tindakan yang tidak benar akan tetapi apabila terjadi pemungutan liar di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membuat dia merasa terganggu karena tidak ada hubungan dengan dirinya.<sup>1</sup>

Dan juga berdasarkan wawancara dengan bapak Zainal Mutaqqin menurutnya:

apabila terjadi pemungutan liar di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membuat dia merasa terganggu dan juga apabila terjadi pemungutan liar tidak membuat citra pegawai menjadi buruk.<sup>2</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu Indah Chairunnisa menurutnya:

dia tidak merasa terganggu apabila terjadi pemungutan liar dan dirinya juga tidak terlalu peduli dengan hal tersebut karena dirinya juga tidak merasa dirugikan dengan hal tersebut. Akan tetapi dia akan merasa risih apabila dia terlibat pemungutan liar dan dapat merugikan dirinya.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tindakan pemungutan liar merusak moral karena rasa peduli masyarakat terhadap pemungutan liar itu

---

<sup>1</sup>Anugrah Maulana., Masyarakat. *Wawancara*. Gowa 12 Februari 2021.

<sup>2</sup>Zainal Mutaqqin, Masyarakat, *Wawancara*. Gowa 12 Februari 2021.

<sup>3</sup>Indah Chairunnisa, Masyarakat. *Wawancara*. Gowa 2 Februari 2021.

masih kurang dan juga masyarakat bisa saja menganggap pemungutan liar itu adalah hal yang sudah biasa atau wajar untuk dilakukan sedangkan tindakan pemungutan liar itu adalah tindakan yang melawan hukum.

## 2. Merusak Budaya

Pemungutan liar yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang sangat lama akan menyebabkan budaya buruk karena pemungutan liar ini adalah hal yang tidak dapat di benarkan. Masyarakat yang berpenghasilan rendahpun akan menjadi beban tambahan apabila terjadi pemungutan liar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh. Ayyub menurutnya:

penyebab seseorang ingin melakukan tindakan pemungutan liar karena penyalahgunaan wewenang.<sup>4</sup>

Dan juga berdasarkan wawancara dengan bapak Anugrah Maulana menurutnya:

penyebab seseorang dapat melakukan tindakan pemungutan liar karena tergoda oleh uang.<sup>5</sup>

Dan juga wawancara dengan ibu Indah chairunnisa mengatakan bahwa:

penyebab terjadinya pemungutan liar itu karena hasil kesepakatan atau kerja sama antara masyarakat dengan oknum pegawai karena pemungutan liar itu tidak akan terjadi apa bila salah satu pihak taat atau patuh terhadap prosedur dan juga menganggap bahwasanya pemungutan liar itu adalah perbuatan yang tidak di benar.<sup>6</sup>

---

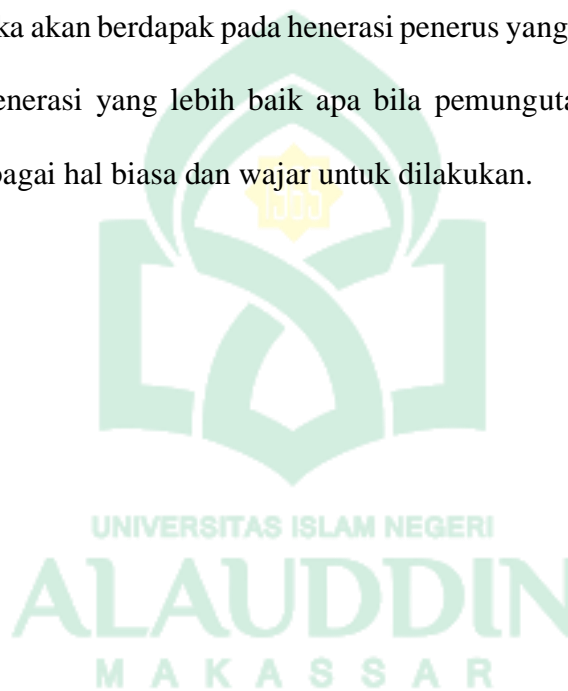
<sup>4</sup>Muh.Ayyub, Masyarakat., *Wawancara*, Gowa 12 Fenruari 2021.

<sup>5</sup>Anugrah Maulana., Masyarakat. *Wawancara*. Gowa 12 Februari 2021.

<sup>6</sup>Indah Chairunnisa, Masyarakat. *Wawancara*. Gowa 2 Februari 2021.

Berdasarkan wawancara tersebut perbuatan pemungutan liar dapat merusak budaya karena perbuatan melawan hukum dan apabila tindakan pemungutan liar dilakukan secara terus menerus akan melahirkan budaya buruk. Dan juga masyarakat akan menganggap pemungutan liar adalah hal yang sudah biasa dan juga mewajarkan apa bila terjadi tindakan pemungutan liar .

Perbuatan pemungutan liar tidak patut di contoh karena melanggar hukum maka akan berdampak pada henerasi penerus yang tentunya tidak akan menjadi generasi yang lebih baik apa bila pemungutan liar ini sudah di anggap sebagai hal biasa dan wajar untuk dilakukan.



***C. Upaya Peningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kec.Somba Opu terhadap Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Islam.***

Kitap suci Alquran merupakan pedoman utama bagi seorang muslim untuk menjalankan kehidupan beragama sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Sedangkan hadist Nabi Muhammad SAW, sendiri merupakan sumber hukum penjelas atau penegas untuk menerangkan point-point yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya.

Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat memang bukan persoalan mudah, akan tetapi, pengajaran-pengajaran yang dilakukan secara berkala akan memberikan efek penerimaan hukum oleh masyarakat itu sendiri.

Suatu hukum yang ada di dalam masyarakat dapat dilaksanakan ataupun diterapkan tergantung pada individu. Berbagai peraturan hukum tersebut merupakan suatu pedoman bagi mereka demi terciptanya suatu kehidupan yang aman, tentram dan damai. Namun peraturan hukum yang ada tidak hanya dilaksanakan maupun diterapkan, melainkan harus dipahami isinya, dihormati, ditaati dan selanjutnya harus ditegakkan.

Untuk meminimalkan pungutan liar di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil, hal itu diperlukan beberapa strategi atau teori untuk segera diimplementasikan dan hentikan pemerasan. Karena semakin banyak tahun Akibat permintaan aparat penegak hukum, perpajakan ilegal global terus meningkat Hukum dirancang untuk mencegah pemerasan Ada banyak "tuduhan liar" dalam sektor pelayanan publik Kejahatan sangat mengakar dan sulit untuk dihilangkan Orang mengembangkan lebih banyak kebiasaan melegalkan

simpanan Bau suap untuk mempermudah proses pengelolaan Semua aspek kehidupan tidak dianggap sebagai kejahatan. Bahkan sektor pelayanan publik telah menjadi sarang pertumbuhan Pungutan liar. Upaya yang dapat dilakukan sebatas pencegahan-pencegahan dan Perangi pemungutan liar.

Menurut pandangan hukum, pemungutan liar akan selalu ada jika Ada banyak kesempatan untuk melakukannya.oknum pegawai dan masyarakat memiliki kedudukan sebagai partisipan yang dapat berpartisipasi di dalamnya Terlibat secara aktif dalam aktivitas pemungutan liar. Oknum pegawai dan masyarakat melakukan pemungutan liar terkait dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Antara Oknum pegawai dan masyarakat memiliki hubungan fungsional. Berbasis tampilan Maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan liar tidak dapat dilakukan Begitu saja, tetapi dapat mencoba meminimalisir pemungutan liar itu.

Usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam sekelompok masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai upaya lebih memahaminya yaitu:

1. Pengetahuan hukum

Suatu peraturan perundang-undangan telah di undangkan dan di terbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan tersebut telah berlaku dan masyarakat dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut.

2. Pemahaman hukum

Masyarakat tidak hanya di tuntut untuk hanya mengetahui hukum, namun diperlukan untuk memahami tujuan dari peraturan perundang-



undangan serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

### 3. Penaatan hukum

Beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat menaati hukum yang berlaku seperti takut terhadap sanksi negatif apa bila melanggar hukum tersebut, menjaga hubungan baik dengan penguasa, menjaga hubungan baik dengan sesamanya, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan kepentingannya terjamin.

### 4. Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan di hargai oleh masyarakat apa bila mereka mengetahui, memahami, menaatinya. Artinya mereka secara nyata dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

### 5. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang matang. Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Somba Opu masih kurang terhadap pemungutan liar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

sipil maka pihak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mila selaku pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bagian pelayanan masyarakat. Menyatakan bahwa:

pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetap menyampaikan kepada masyarakat bahwa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu tidak ada pemungutan biaya apapun serta di sarankan kepada masyarakat untuk mengurus langsung.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muh.Ayyub selaku masyarakat, menurutnya:

upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengawasi pelayanan publik agar potensi pemungutan liar dapat diminimalisir.<sup>8</sup>

Sedangkan wawancara dengan bapak Anugrah Maulana menurutnya:

upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan mengedukasi masyarakat terkait kesadaran hukum terhadap pemungutan liar.<sup>9</sup>

Dan juga wawancara dengan ibu Indah Chairunnisa menurutnya :

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pemungutan liar serta dampak dari pemungutan liar itu sendiri.<sup>10</sup>

Dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pemimpin-pemimpin. Masyarakat yang

---

<sup>7</sup>Mila, Pelayanan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, *Wawancara*, Gowa 26 Januari 2021.

<sup>8</sup>Muh.Ayyub, Masyarakat., *Wawancara*, Gowa 12 Februari 2021.

<sup>9</sup>Anugrah Maulana, Masyarakat, *Wawancara*, Gowa 12 Februari 2021.

<sup>10</sup>Indah Chairunnisa, Masyarakat, *Wawancara*, Gowa 2 Februari 2021.

normal mempunyai kesadaran hukum, namun tingkat kesadaran hukum masyarakat yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Maka dari itu masih perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis angkat, maka dapat disimpulkan bahwa.

1. pada umumnya masyarakat Kecamatan Somba Opu mengetahui apa itu pemungutan liar dan dapat menjelaskan apa pemungutan liar itu sendiri. Dan juga masyarakat pada dasarnya mengetahui penyebab seseorang terlibat pungli. Akan tetapi Kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Somba Opu terhadap Pemungutan liar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dikatakan masih kurang karena kurangnya edukasi atau pemahaman terhadap pemungutan liar itu sendiri.
2. Upaya Peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang matang. Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat ini. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban dibidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

**B. Implikasi Penelitian**

1. Perlu adanya upaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar mencegah dan mengurangi tindakan pemungutan liar serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Somba Opu terhadap pemungutan liar.
2. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Somba Opu masih kurang, sehingga Perlu adanya pemberian sanksi atau efek jera kepada masyarakat Kecamatan Somba opu yang terlibat pemungutan liar.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*,. Kencana:Jakarta,2015.
- Ahmad, Bani Suebani, *Sosiologi Hukum*.
- Adz-Dzahabi, Mam. *Dosa-dosa Besar*, Pustaka Arafah: Solo,2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, (Rineka Cipta:Jakarta,2006.
- Arliman, S Laurensius. *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*.Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*,Sinar Grafika: Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*.PT.gramedia pustaka utama:jakarta,2011.
- Gulo,W. *Metode Penelitian*, PT Grasindo:jakarta,2005.
- Hamzah Hazan,. *Hukum Pidana Islam*, watampone:Syahadah,2016.
- Hill, Napoleon. *Secrets Napoleon Hill's Mind*, PT.Cahaya Insan Suci:Jakarta selatan 12510, Indonesia.
- Hot, Ibrahim. *rahasia di balik sapu bersih pungli*,grup Penerbit CV Budi Utama: yogyakarta,2017.
- Irfan, H.M. Nurul. *korupsi dalam hukum islam*, jakarta: Amzah,2011.
- Jauhari, Imam. *Sosiologi Hukum*. pustaka Bangsa Presss: Medan,2009.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Qur'an kemenag*.
- Krabbe, Aveldoorn,V,. *pengetahuan ilmu hukum*,PT,Pradnya Paramita:Jakarta, 2000.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: jakarta,2006.

- Lamintang P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindakan Pidana Korupsi*, Pionir Jaya: Bandung.1991.
- Moeloeng Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung PT Remaja: Rosdakarya.2000.
- Nashiruddin, Muhammad syaikh, al albani. *Kampung Sunnah*, Jakarta:Pustaka Ebook ahlussunnah,2009.
- Narbuko ,Chalid, Achmadi, *Metologi penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 2007.
- Nogi, S.Tangkilisan Haseel. *Manajemen Publik*,. PT Gramedia Widiasarana: Indonesia,Jakarta,2005.
- Nabawi, Hadani. *Metode Penelitian Bidang Sosial*,Jogjakarta: Gajah Mada University Press,1990.
- Pranomo, wifyo. *melawan korupsi tanpa gaduh*. rayyana komunikasindo:jakarta,2019.
- Poltak, Sinambela Lijan. *Reformasi Pelayanan Publik: Terori, Kebijakan dan Implementasi*.Sinar Grafika Offser:Jakarta,2006.
- Rahardjo Satjipto , , *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*,Alumni, Bandung.
- Salim. Peter , Salim, Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.1991.
- Soedjono, D. *pungli analisa hukum & Kriminologi*, Sinar Baru:Bandung,1983.
- Soekanto, Soerjono. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*,.Raja Grafindo Persada:Jakarta,2014.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*,Rajawali Press:Jakarta,1982,
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta:Bandung, 1983.

Soekanto, Soerjono *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni:Bandung, 1979.

Studi Forum keuangan Negara. *Esai Keuangan Negara sumbangsi pemikiran untuk negeri*.

Suebani, Bani Ahmad. *sosiologi hukum*.pustaka setia: Bandung,2013.

Yusuf, Qaradhawi Syekh. *Kumpulan Fatwa Tentang Zakat dan Sedekah*, Buku Andalan: jakarta: 1995.

## JURNAL

Alimuddin, *Hisab Rukyat Waktu Shalat Dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara Astronomi Awal Dan Akhir Waktu Shalat)*, Vol 8 No.1 2020.

Abdullah,Dudung. *Komunitas Yang Gagal Meraih Kesuksesan II: Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun Dan Allazina Yaftaruna 'Ala Allahi Al-Kaziba..* Vol 7 No.2 2018.

Abdullah, Dudung, *Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Tentang Makna Dan Eksistensi)*. Vol 6 No 2. 2017.

Abdullah, Dudung, *Komunitas Yang Gagal Meraih Kesuksesan (Tafsir Analisis Tentang Term Al-Sāhirūn, Al-Zālimūn Dan Al-Kāfirūn)*, Vol 2 No 1 2018.

Abdullah, Dudung, *Al-Qur'an Dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term "Al-Birr")* Vol 6 No.1 2017.

Anis, Muhammad, *Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Vol 1 No.1 2019.

Jayadi, Ahkam., *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Vol 4 no.2 2017.

Marilang, *Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah*. Vol 7 No.2 2018.

Muhammadong, *Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsmen Kota Makassar*. Vol.No 1 2014.



Khalik, Subehan, *Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah*, Vol.7 No.1.

Khalik, Subehan, *Menguak Eksistensi Akal Dan Wahyu Dalam Hukum Islam*, Vol 6 No.2 2017.

Sastrawati, Nila, *Personal Branding Dan Kekuasaan Politik Di Kabupaten Luwu Utara*, Vol 6 No 2 2017.

Pratiwi Ratih., Hasan Hamza., *Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam.*, Vol 2 no.2 2020.

Wibawa, Samodra, Fauzy Arya , dan Habibah Ainun. *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

#### INTERNET

<https://almanhaj.or.id/2283-hukum-seputar-suap-dan-hadiah.html>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/>

<https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/11/09/tidak-masuk-surga-pemungutan-pajakcukai/>,

<https://www.kompasiana.com/taqie31/5a8e9e5816835f62e943fac4/penyelewengan-jabatan.>

#### WAWANCARA

Mila, Pelayanan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, *Wawancara*, Gowa 26 Januari 2021.

Zainal Mutaqqin, Masyarakat ,*Wawancara*. Gowa 12 Februari 2021.

Muh.Ayyub, Masyarakat., *Wawancara*, Gowa 12 Februari 2021

Anugrah Maulana, Masyarakat, *Wawancara* .Gowa 12 Februari 2021

Indah Chairunnisa, Masyarakat. *Wawancara*. Gowa 2 Februari 2021.

## LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara/Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Gowa dalam perspektif Hukum Islam (studi kasus pemungutan liar di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kec. Somba Opu)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

#### **Pertanyaan untuk Masyarakat:**

1. Apa yang anda ketahui tentang pemungutan liar?
2. Apa yang menjadi penyebab seseorang ingin melakukan tindakan pungli?
3. Bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang ingin melakukan pungli di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil?:
4. Apa solusi yang dapat anda tawarkan untuk mencegah terjadinya pungli?
5. Apakah apabila terjadi pungli di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan membuat anda terganggu?
6. Apabila ada pegawai yang menawarkan biaya tambahan untuk memproses lebih cepat urusan anda. Apakah anda akan memberikan biaya tambahan tersebut?.
7. Apakah anda mengetahui bahwa suap menyuap / pungli di larang dalam islam?

### **Pertanyaan untuk pegawai Dukcapil**

1. Apa yang menjadi penyebab masyarakat ingin melakukan tindakan pemungutan liar?
2. Apakah kesadaran hukum masyarakat di kabupaten gowa terhadap pungli masih kurang?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pungli?
4. Bagaimana anda menyikapi tentang seseorang yang ingin melakukan pungutan liar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil?

### **B. Komposisi BAB**

1. BAB I PENDAHULUAN
  - a. Latar Belakang Masalah
  - b. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
  - c. Rumusan Masalah
  - d. Kajian Penelitian Terdahulu
  - e. Tujuan dan Kegunaan
2. BAB II TINJAUAN TEORETIS
  - a. Kesadaran hukum masyarakat
  - b. Pungutan liar
  - c. Pungutan liar Perspektif Hukum Islam
3. BAB III METODELOGI PENELITIAN
  - a. Jenis dan Lokasi Penelitian
  - b. Pendekatan Penelitian
  - c. Sumber Data
  - d. Metode Pengumpulan Data
  - e. Instrumen Penelitian
  - f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
  - g. Pengujian Keabsahan Data

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Gowa**



**Wawancara dengan Ibu Mila Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bagian Pelayanan Masyarakat.**





**Wawancara dengan Bapak Anugrah Maulana selaku Masyarakat.**



**Wawancara Dengan Bapak Zainal Mutaqqin Selaku Masyarakat**



**Wawancara dengan Bapak Muh.Ayyub selaku Masyarakat.**



**Wawancara dengan Ibu Indah Chairunnisa Selaku masyarakat**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp. (0411) 864928-864930 Fax.864923  
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-GowaTelp. 0411-841879, Fax: 0411-82211400

Nomor : B- 121 /SH.01/PP.00.9/01/2021

Romang Polong, 14 Januari 2021

Sifat : Penting

Lamp. : Proposal

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

**Kepada Yth :**  
**Dinas Penanaman Modal Daerah**  
**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang**  
**Penyelenggaraan Pelayanan Prov. Sul-Sel**  
**di**  
**Makassar**

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Nofita Rukmawana  
 Nim : 10200117035  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan/prodi : Hukum Tatanegara  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : BTN Tamarunang Indah i


Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan judul skripsi :

***"Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemungutan Liar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu)"***

Dosen Pembimbing :  
 1. Dr. Nila Sastrawati, M.Si.  
 2. Muh. Anis, S.Ag., M.H.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gowa, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2021 s.d.14 Februari 2021

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.

  
 Dr. H. Muhammad Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.  
 Nip. 19731122 200012 1 002

**Tembusan:**

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Romang Polong Gowa  
 (Sebagai Laporan).





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 10080/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Bupati Gowa

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-121/SH.01/PP.00.9/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDI NOFITA RUKMAWANA**  
 Nomor Pokok : 10200117035  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN GOWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEMUNGUTAN LIAR DI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KEC. SOMBA**

**OPU) "**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 Januari s/d 15 Februari 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 15 Januari 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I  
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
 2. Peringkat.

SIMAP PTSP 15-01-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 19 Januari 2021

K e p a d a

Nomor : 503/065/DPM-PTSP/PENELITIAN/01/2021      Yth. **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa**  
Lamp : -      Di -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**      Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 10080/S.01/PTSP/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **ANDI NOFITA RUKMAWANA**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba / 21 November 1999  
Nomor Pokok : 10200117035  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Dusun Masagena Desa Bontoharu Kec Rilau Ale

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN GOWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEMUNGUTAN LIAR DI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KEC. SOMBA OPU)"**

Selama : 15 Januari 2021 s/d 15 Februari 2021  
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
a.n. **BUPATI GOWA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si**  
pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Gowa ( Sebagai Laporan )  
2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
3. Yang bersangkutan;  
4. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Tumanurung No.2 Sungguminasa Kode Pos 92111,  
Nomor Telepon dan Faksimile : 0411-8988898, e-mail : disdukcapilgowa@gmail

Sungguminasa, 25 Januari 2021

Nomor : 017 / I / Disdukcapil/2021  
Perihal : Persetujuan Pelaksanaan Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin  
Makassar  
Di -  
Makassar

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 503/065/DPM-PTSP/ Penelitian /01/2021, Tanggal 19 Januari 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Adapun waktu pelaksanaan penelitian mulai pada tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2021.

Sehubungan dengan maksud tersebut maka pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan penelitian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sebagaimana yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: <b>ANDI NOFITA RUKMAWANA</b>
Tempat/Tgl.Lahir	: Bulukumba, 21 November 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Masagena Desa Bontoharu Kec. Rilau Ale.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan seperlunya.

An. Kepala Dinas  
Sekretaris

Ub.  
Kasubag Umum & Kepegawaian

**KUSMA SUNASTRI, S.E.**  
 Pangkat : Penata  
 NIP:198211062011012004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andi Nofita Rukmawana lahir di Bulukumba pada tanggal 21 November 1999, dari ayah yang bernama Andi Muh. Jufri dan ibu Andi Suhermah. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara.

Secara formal penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di SD 83 Pangi-Pangi 2005-2011. Dan melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 39 Bulukumba pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 10 Bulukumba pada 2014 dan lulus pada tahun 2017. Selama sekolah di SMAN 10 Bulukumba penulis aktif di organisasi Kepramukaan.

Setelah tamat SMA, Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 untuk program strata S1 Jurusan Hukum Tatanegara.

Selama berstatus Mahasiswa penulis aktif dalam lembaga kemahasiswaan seperti Independent Law Student (ALSC) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur atas selesainya Skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat tentang pemungutan Liar Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Pemungutan Liar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kecamatan Somba Opu)”